



Administratio:

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

Volume 14 (2) 2023: 113-122

P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977

DOI: 10.23960/administratio.v14i2.395

Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)



ARTICLE



Exogeneous Force Theory, Sebuah Antitesis Teori Negara Otonom Dalam Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya

Ferry Setiawan^{1*}, Ahmad Saefulloh², Reny Puspita Syari Nasution³

^{1,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Indonesia

²Program Studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Indonesia

How to cite: Setiawan, F., Saefulloh, A., Nasution, R.P.S. (2023) Exogeneous Force Theory, Sebuah Antitesis Teori Negara Otonom Dalam Formulasi Kebijakan Publik Perubahan Iklim Di Kota Palangka Raya. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2)

Article History

Received: 3 Oktober 2023

Accepted: 1 Desember 2023

Keywords:

Autonomy state theory

Exogenous force theory

Climate change

ABSTRACT

Autonomous state theory is a view to see how public policy is implemented. Even if a policy is unable to overcome economic problems because it is not tied to the provision of public goods, the state still has the power to make its own policies. From the perspective of social goals to avoid damage, climate change and disaster adaptation policies in Indonesia are examples of appropriate policies that can be developed using this. This research aims to analyze whether the Autonomous State Theory can be reapplied to the emergence of climate change adaptation policies in the city of Palangka Raya or whether exogenous incentives have more influence on the implementation of climate change policies or not. In this research, the author used qualitative methods. Conducting an in-depth case study on the implementation of climate change policies in the City of Palangka Raya. This may involve interviews with policy makers, stakeholders, and analysis of policy documents. In-depth interviews were conducted with various parties involved in the climate change policy formulation process, namely, government, academics, environmental activists and other stakeholders. In addition, Analyze policy documents, reports and other information resources to understand the context, objectives and impact of climate change policies in the City of Palangka Raya. The data sources for this research are generally primary and secondary data. To be able to answer this research question, analysis techniques using qualitative methods are needed. The results of the research conclude that the exogenous theory is the antithesis of the Autonomous State Theory in formulating public policy regarding climate change in the city of Palangka Raya. This theory emphasizes the importance of involving actors other than the state in reducing the impacts of climate change. Countries must work together with private companies, international organizations, and civil society to develop effective solutions.

* Corresponding Author

Email : setiawan.ferry36@fisip.upr.ac.id

Kata Kunci:

Teori Negara Otonom
Teori Eksogen
Perubahan Iklim

ABSTRAK

Teori negara otonom (*Autonomy state theory*) merupakan pandangan untuk melihat bagaimana kebijakan public dilaksanakan. Sekalipun suatu kebijakan (*Policy*) tidak mampu untuk mengatasi persoalan ekonomi karena tidak terikat pada penyediaan barang publik dimana, negara masih mempunyai kekuasaan dalam membuat kebijakannya sendiri. Dari kacamata tujuan sosial untuk menghindari kerusakan, kebijakan perubahan iklim dan adaptasi bencana di Indonesia adalah contoh kebijakan yang tepat yang dapat dikembangkan dengan menggunakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Teori negara otonom (*Autonomy state theory*) dapat diterapkan kembali terhadap munculnya kebijakan adaptasi perubahan iklim di kota Palangka Raya ataupun insentif eksogen yang lebih berpengaruh terhadap implementasi kebijakan perubahan iklim atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Melakukan studi kasus mendalam pada implementasi kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Ini dapat melibatkan wawancara dengan para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan analisis dokumen kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan perubahan iklim yaitu, pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Menganalisis dokumen kebijakan, laporan, dan sumber daya informasi lainnya untuk memahami konteks, tujuan, dan dampak dari kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Sumber data penelitian ini umumnya adalah data primer dan sekunder. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian ini diperlukan teknik analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa teori eksogen merupakan antitesis dari Teori Negara otonom (*Autonomy state theory*) dalam merumuskan kebijakan publik mengenai perubahan iklim di kota Palangka Raya. Teori ini menekankan pentingnya melibatkan aktor selain negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Negara-negara harus bekerja sama dengan perusahaan swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi yang efektif.

A. PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, topik perubahan kebijakan telah mendapat banyak perhatian. Selain itu, dapat dikatakan bahwa beberapa kerangka teoritis yang paling penting dalam literatur ilmu kebijakan, seperti kerangka koalisi advokasi, kerangka keseimbangan bersela (Baumgartner & BD Jones, 2009), dan kerangka berbagai aliran, sebagian besar berfokus pada pemahaman perubahan tersebut (Real-Dato J, 2009). Salah satu argumen dalam literatur tersebut adalah bahwa perubahan kebijakan terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk: Beberapa perubahan bersifat bertahap; ada pula yang lebih mendasar dan bahkan ada yang bisa disebut paradigmatik. Namun yang menarik adalah banyaknya perdebatan akademis mengenai kebijakan perubahan iklim ini mengambil bagian penting dalam konteks—bidang kebijakan (domain kebijakan, monopoli kebijakan, subsistem kebijakan, bidang kebijakan) di mana perubahan tersebut terjadi—sebagai hal yang lumrah. Misalnya, kerangka koalisi advokasi berfokus pada "subsistem" dari lanskap kebijakan yang lebih luas, seperti kebijakan lingkungan hidup (Baumgartner & BD Jones, 2009), namun tidak pada pembentukan subsistem tersebut.

Dari sisi lain, kebijakan tersebut tidak membawa berkah bagi negara/daerah. Oleh sebab itu, untuk menghindari kerusakan dan persoalan pendapatan masyarakat, kebijakan ini masih dapat dilakukan. Sejak tahun 2009, *Asian Cities Climate Resilience Network* (ACCCRN)

disponsori organisasi luar negeri, mengundang beberapakota di Indonesia yakni, 8 kota di Indonesia. Hal bertujuan untuk membantu delapan kota tersebut dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, terutama di kalangan kelompok miskin dan rentan, guna menghindari kerugian ekonomi yang besar (Béland et al., 2018). Diakui secara luas bahwa perubahan iklim menimbulkan tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai dengan naiknya permukaan air laut, badai yang lebih sering dan parah, perubahan curah hujan, dan banyak lagi, serta perubahan suhu. Hal ini memperburuk berbagai tantangan yang dihadapi perkotaan.

Kerangka berbagai aliran melihat dinamika yang terpisah dalam suatu bidang (baik transportasi, pendidikan atau lingkungan hidup), dan menentukan bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi perubahan kebijakan. Dan analisis perubahan kebijakan melalui lensa kerangka keseimbangan bersela juga melihat perubahan mendadak dalam bidang kebijakan yang sudah ada seperti energi (Bhandary et al., 2021). Kurangnya perhatian yang diberikan pada bidang kebijakan secara keseluruhan tidak hanya terbatas pada model ilmu kebijakan terkemuka saja. Meninjau sejumlah buku teks dan buku pegangan mengenai kebijakan publik, kami menemukan bahwa istilah "bidang kebijakan" pada dasarnya dianggap biasa saja; Meskipun sering digunakan, variabel ini jarang didefinisikan atau diperlakukan sebagai variabel yang relevan dalam memahami dinamika kebijakan. Akibatnya, tingkat analisis yang penting untuk perubahan kebijakan tidak ada. Ini luar biasa karena, seperti Massey dkk. (2014) menyatakan, "bidang kebijakan mewakili bentuk tertinggi dari kapasitas pengaturan dan pemerintahan negara bagian dan warga negara atas atopik tertentu..." (Massey et al., 2014).

Keberadaan (atau ketiadaan) hal-hal tersebut mempunyai implikasi penting terhadap jenis dan penyediaan barang publik dan semi-publik serta tingkat perhatian yang diberikan terhadap permasalahan publik (misalnya topik-topik seperti pertanian, layanan kesehatan, atau pendidikan). Selain itu, stabilitas juga ditambahkan pada penyediaan barang publik ini karena bidang kebijakan cenderung diisi oleh organisasi khusus (misalnya kementerian), yang terkait dengan akses dan titik veto terhadap proses pengambilan keputusan (misalnya, posisi di meja selama kabinet pertemuan). Mengingat pentingnya peran bidang kebijakan dalam sistem pemerintahan, ditambah dengan kurangnya perhatian terhadap bidang kebijakan dalam literatur (dari mana bidang tersebut berasal).dari dan bagaimana perubahan tersebut muncul) membuka peluang unik untuk memperluas pemahaman ilmiah tentang perubahan kebijakan (Capano & Howlett, 2020).

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mulai mengeksplorasi secara konseptual dan empiris bagaimana bidang kebijakan dapat muncul di tingkat daerah, khususnya dengan menggunakan isu adaptasi perubahan iklim sebagai sebuah kasus. Kami fokus pada adaptasi perubahan iklim karena, selama dekade terakhir, upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin besar telah menjadi landasan agenda kebijakan iklim domestik dan internasional (Guild, 2020). Di tengah kesibukan aktivitas kebijakan, yang terutama terlihat di Eropa, para peneliti mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: Perubahan nyata apa dalam kebijakan yang terjadi di tingkat daerah, tingkat dan apa yang dapat menjelaskan perubahan ini (Dupuis J & Biesbroek GR, 2013).

Kota Palangka Raya, seperti banyak wilayah di Indonesia, Palangka Raya saat ini mengalami dampak nyata dari perubahan iklim, seperti kenaikan suhu, perubahan pola hujan, dan peningkatan risiko bencana alam. Kota Palangka Raya memiliki sumber daya alam yang signifikan, seperti hutan dan sungai, yang dapat menjadi pusat perhatian dalam konteks perubahan iklim. Dari pendekatan teori Negara otonomi, dimana sebuah daerah mempunyai wewenang absolut dalam perancangan kebijakan, kota/daerah percontohan dapat membuat Kebijakan (*Policy*) adaptasi perubahan iklim atas dasar kepedulian daerah terhadap bencana. risiko (bahaya) yang kemudian hari timbul di wilayah mereka tersebut, yang akan berdampak

pada bencana sosial dan penghasilan masyarakat luas. Dari permasalahan yang dipaparkan, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah *self-governing state theory* (negara berpemerintahan sendiri) dimana negara/daerah dapat mengambil keputusan kebijakan sendiri sesuai dengan kepentingannya yang direproduksi dalam penelitian di Kota Palangka Raya atau model pendekatan yang insentif *exogeneus force theory* yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim di Kota Palangka Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Kebijakan

Definisi kebijakan Walaupun istilah kebijakan dan sinonimnya domain kebijakan, monopoli kebijakan, subsistem kebijakan, Kebijakan hanya mendapat perhatian yang terbatas dalam literatur, terdapat beberapa deskripsi longgar mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan. Mei dkk. (2006) menggambarkan bidang-bidang tersebut sebagai "bidang kebijakan yang mapan yang memberi makna pada permasalahan bersama dan mempunyai sifat integratif." Meminjam dari Laumann dan Knoke (1987), Birkland (2011) menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah "kebijakan yang substantif atas dimana para partisipan dalam pembuatan kebijakan bersaing dan berkompromi, seperti domain kebijakan mental lingkungan atau domain kesehatan." Lebih lanjut, Howlett dkk. (2009), Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) dan Baumgartner dan Jones (2009) mengkarakterisasi mereka sebagai konstelasi aktor, institusi dan gagasan dalam sektor kepentingan tertentu yang mengajukan definisi masalah dan solusi untuk sektor tersebut. (Untuk penjelasan serupa, lihat juga Knoke 2004; Burstein 1991). Namun Massey dan Huitema (2013) menyatakan bahwa bidang kebijakan dapat dilihat sebagai unit pemerintahan yang disetujui negara dalam sistem sosiopolitik suatu negara di mana terdapat apa yang disebut "otoritas substantif", "tatanan kelembagaan" dan "keahlian substantif" bekerja bersama-sama untuk saling mendukung dalam pengelolaan suatu isu publik atau serangkaian isu terkait (misalnya, pertanian, pertahanan, layanan kesehatan). Otoritas substantif berkaitan dengan keberadaan produk dan keluaran kebijakan seperti program kebijakan, peraturan perundang-undangan. Tatanan kelembagaan dapat dilihat sebagai institusi pemerintah yang menghasilkan kewenangan substantif, seperti kementerian, kantor kementerian, dan komite parlemen. Dan keahlian substantif adalah wujud pengetahuan ahli baik di dalam maupun di luar pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga yang memiliki kepentingan dalam serangkaian isu tertentu (misalnya, jaringan isu kebijakan, LSM, lembaga think tank, dan lain-lain). Apa yang membedakan definisi ini dengan pendahulunya adalah bahwa definisi ini merupakan deskripsi bidang kebijakan pertama yang dapat diterapkan, yang dapat digunakan untuk menguji potensi keberadaan dan kemunculan kebijakan.

Kerangka Konseptual Kebijakan

Setelah mendefinisikan suatu bidang kebijakan, pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana memahami kemunculan adaptasi secara konseptual dan dapatkah kemunculan tersebut dipetakan secara empiris? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami melihat kemungkinan munculnya bidang kebijakan melalui tiga lensa teoretis ilmu politik yang berpusat pada negara: pluralisme, elitisme, dan institusionalisme. Alasannya adalah sebagai berikut. Dari pembacaan literatur ilmu kebijakan, teori yang paling dominan untuk menjelaskan dinamika dan perubahan kebijakan adalah kerangka keseimbangan bersela, kerangka koalisi advokasi, dan kerangka berbagai aliran (lihat Real-Dato 2009). Sedangkan ketiga teori ini mempunyai kemampuan menjelaskan bagaimana kebijakan publik bekerja dan pada akhirnya berubah, fokus utamanya adalah merinci mekanisme penetapan agenda dan dinamika perubahan dalam bidang kebijakan yang sudah ada dan sudah mapan, dan bukan bagaimana

bidang kebijakan baru akan mulai muncul (Massey dan Huitema 2013). Unit analisis mereka adalah isu kebijakan (misalnya, penguatan peraturan lingkungan hidup, pemberlakuan pajak ramah lingkungan) dan bukan bagaimana bidang kebijakan lingkungan itu sendiri muncul. Intinya, studi tentang kemunculan di lapangan lebih dari sekadar penetapan agenda dan perubahan. Teori ini secara efektif melanjutkan teori-teori ini untuk menunjukkan bagaimana isu kebijakan dapat berkembang menjadi suatu bidang.

Exogeneous Force Theory

Kekuatan eksogen mengacu pada faktor atau pengaruh eksternal yang mempengaruhi atau membentuk suatu sistem, proses, atau fenomena. Kekuatan-kekuatan ini tidak bergantung pada sistem itu sendiri dan dapat memberikan dampak dari luar (Novalia & Malekpour, 2020). Mereka dapat berasal dari berbagai sumber seperti faktor sosial, ekonomi, politik, teknologi, atau lingkungan. Dalam ilmu ekonomi, kekuatan eksogen sering digunakan untuk merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, atau bencana alam (Buckley, 2021). Kekuatan-kekuatan ini berada di luar kendali individu atau dunia usaha dan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dalam bidang hubungan internasional, kekuatan eksogen dapat mencakup peristiwa geopolitik, seperti perang atau perubahan aliansi, yang berdampak besar pada keseimbangan kekuatan dan pengaruh antar Negara (Xie et al., 2020).

Hal ini juga dapat mencakup tren ekonomi global atau kemajuan teknologi yang mempengaruhi perdagangan dan komunikasi global. Kekuatan eksogen juga penting dalam bidang-bidang seperti sosiologi, psikologi, dan biologi, di mana faktor eksternal dapat mempengaruhi perilaku individu, struktur sosial, atau proses biologis (Buckley, 2021). Misalnya, dalam sosiologi, kekuatan eksogen dapat merujuk pada norma-norma masyarakat, nilai-nilai budaya, atau kebijakan pemerintah yang membentuk perilaku sosial. Memahami dan menganalisis kekuatan eksogen sangat penting untuk memprediksi dan memahami bagaimana sistem dan proses dapat berubah atau berkembang seiring waktu. Dengan mengenali dan merespons pengaruh-pengaruh eksternal ini, individu, organisasi, dan masyarakat dapat beradaptasi dan menavigasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan ini dengan lebih baik (Dupuis J & Biesbroek GR, 2013).

Teori negara otonom (*Autonomy state theory*)

Perspektif ini berpendapat bahwa negara bukan sekedar aktor pasif yang merespon tuntutan dan tekanan masyarakat atau aktor eksternal. Sebaliknya, mereka mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengambil inisiatif dalam menetapkan prioritas dan agenda kebijakan mereka sendiri (Wallace et al., 2020). Pendekatan proaktif terhadap pembentukan kebijakan ini menyiratkan bahwa negara dapat bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, meskipun kepentingan tersebut mungkin tidak sejalan dengan preferensi kelompok masyarakat yang berpengaruh atau pemangku kepentingan eksternal (De La Cruz et al., 2020).

Hal ini juga menunjukkan bahwa negara-negara dapat menerapkan independensi dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan mereka untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang mereka yakini merupakan kepentingan terbaik mereka dalam jangka panjang (Reinalda & Verbeek, 2023). Penting untuk dicatat bahwa meskipun negara dapat bersikap proaktif dalam pembentukan kebijakan, mereka masih dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk politik dalam negeri, hubungan internasional, kondisi ekonomi, dan opini publik. Namun, sejauh mana faktor-faktor tersebut menghambat atau membentuk tindakan negara dapat bervariasi tergantung pada keadaan spesifik dan kekuatan lembaga-lembaga Negara (Wallace et al., 2020). Secara keseluruhan, aspek Teori Negara Otonomi ini menyoroti sifat dinamis dan kompleks dari perilaku negara di arena politik. Hal ini memberikan sebuah lensa

untuk menganalisis bagaimana negara menggunakan lembaga mereka dalam membentuk kebijakan dan mencapai tujuan strategis mereka (Schimmelfennig, 2020).

C. METODE

Penelitian dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau saksi terhadap gejala atau peristiwa yang menjadi topik penelitian (Sugiyono, 2016). Observasi dilakukan pada formulasi implementasi kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Ini dapat melibatkan wawancara dengan para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan analisis dokumen kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan perubahan iklim yaitu, pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Menganalisis dokumen kebijakan, laporan, dan sumber daya informasi lainnya untuk memahami konteks, tujuan, dan dampak dari kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Pendekatan subjektif digunakan untuk mempertimbangkan penggunaan informasi tambahan dari kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Kedua pengkajian antara teori Negara otonom (*Autonomy state theory*) dan *Exogeneus Force Theory* di Palangka Raya ini fokus pada kebijakan perubahan iklim tersebut untuk menunjukkan komitmen menekankan pentingnya melibatkan aktor selain negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Negara-negara harus bekerja sama dengan perusahaan swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Analisis dokumen kebijakan tersebut yang dianggap tepat untuk penelitian ini diperoleh dari data yang dapat diakses secara otoritatif dan bebas serta telah diperiksa dan dianggap mewakili representasi yang substansial dan tepat. Informasi ini ditriangulasi dengan bukti informasi penting yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi melibatkan *trade-off*, dan beberapa kebijakan mungkin akan menciptakan dampak negatif terhadap individu, sektor, geografi, dan jangka waktu. Kebijakan yang tidak mengandung dampak negatif mungkin tidak dapat dirancang (Dupuis J & Biesbroek GR, 2013). Adaptasi juga dapat berbenturan dengan tujuan-tujuan masyarakat lainnya, hal demikian juga yang terjadi di Kota Palangka Raya yang beranggapan bahwa adaptasi adalah solusi ajaib yang dapat meningkatkan ketahanan iklim, tanpa mengorbankan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan lain seperti pertumbuhan ekonomi, inklusi, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, adaptasi harus melibatkan pengawasan kritis (Rhama & Setiawan, 2022). Dalam jangka panjang, adaptasi iklim akan lebih efektif, akan menjamin dukungan sosial, dan akan membentuk dampak sosial dan perubahan iklim serta perilaku individu dengan cara yang diinginkan, jika hal tersebut dipandang sah, adil, dan efektif. Banyak pakar yang menyerukan kebijakan pembangunan yang tahan terhadap perubahan iklim (Kabat et al., 2003).

Beberapa pendapat mengemukakan bahwa perubahan iklim digambarkan sebagai “keburukan” global yang mempunyai konsekuensi negatif bagi manusia dan komunitasnya. Banyak literatur mengenai adaptasi berfokus pada penilaian risiko iklim dan pengurangan kerentanan masyarakat yang menghadapi risiko ini. Namun, para ahli juga mencatat bahwa perubahan iklim dapat menciptakan peluang ekonomi (Spaargaren, 2020), dan kebijakan adaptasi juga harus mengatasi permasalahan iklim ini. artinya menyajikan kasus penting untuk mempelajari tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim serta peluang-peluang ekonomi baru yang ditawarkannya. Adaptasi perubahan iklim dapat menciptakan

peluang ekonomi baru dengan cara yang baru dan menarik (Massey et al., 2014). Salah satu kegiatan yang memberikan dampak di Kalimantan Tengah yang tercatat adanya peluang untuk berinvestasi pada infrastruktur baru guna memanfaatkan musim tanam yang lebih panjang dan tingkat produktivitas pertanian yang lebih tinggi yaitu *Food Estate*, serta berdampak juga pada perubahan kawasan dari hutan menjadi sektor pertanian.

Kesimpulannya, adaptasi iklim seharusnya memberikan lebih sedikit tantangan kebijakan terkait mitigasi iklim, mengingat manfaat lokalnya. Namun, unit-unit tata kelola di Kota Palangka Raya menunjukkan variasi yang luar biasa dalam respons mereka terhadap tantangan adaptasi. Beberapa proyek mereka mungkin tidak sejalan dengan resep rasionalitas ilmiah dan ekonomi. Namun, terdapat logika dalam variasi ini, yang dapat dipahami dengan lebih baik dengan memasukkan politik ke dalam kajian adaptasi iklim.

Salah satu kekuatan eksogen ini dapat memberikan dampak positif dan negative pada kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Hal-hal tersebut dapat menciptakan peluang untuk pertumbuhan, inovasi, dan pembangunan, namun juga dapat menimbulkan tantangan dan mengganggu sistem dan proses yang ada. Agar dapat merespons kekuatan-kekuatan eksogen secara efektif di Kota Palangka Raya, penting untuk memiliki pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang berperan dan potensi dampaknya. Hal ini juga melibatkan untuk dilakukannya penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis tren dan pola. Hal ini juga memerlukan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, karena kekuatan eksogen tidak dapat diprediksi dan bersifat dinamis (Susanti & Kurniawan, 2022).

Dalam beberapa kasus, individu atau organisasi mungkin dapat memitigasi dampak negatif dari kekuatan eksogen atau bahkan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Hal ini dapat melibatkan perencanaan strategis, kolaborasi, dan inovasi. Misalnya, dalam menghadapi kemajuan teknologi yang mungkin mengganggu industri tradisional, perusahaan dapat beradaptasi dengan melakukan transformasi digital dan mengeksplorasi model bisnis baru. Demikian pula, di Kota Palangka Raya dapat merespons perubahan geopolitik dengan mendiversifikasi mitra dan memperkuat hubungan negosiasi mereka. Kesimpulannya, kekuatan eksogen memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Hal ini dapat mempunyai dampak besar terhadap perekonomian, masyarakat, dan hubungan nasional serta internasional. Memahami dan merespons kekuatan-kekuatan ini secara efektif sangat penting bagi individu, organisasi, dan masyarakat untuk berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan selalu berubah (Bhandary et al., 2021).

Penting untuk menyadari bahwa individu dan organisasi mempunyai hak dan kendali dalam cara mereka merespons kekuatan-kekuatan eksogen. Meskipun kekuatan-kekuatan ini mungkin berada di luar kendali langsung, mereka masih dapat membuat pilihan dan mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi hasil mereka. Misalnya saja, dalam menghadapi kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksogen seperti resesi global, dunia usaha dapat memilih untuk menyederhanakan operasi mereka, memangkas biaya, dan berinovasi agar tetap tangguh. Individu juga dapat beradaptasi dengan mengasah keterampilannya, mencari peluang baru, atau bahkan memulai bisnis sendiri. Demikian pula, dalam bidang geopolitik, negara-negara dapat mengambil keputusan strategis dan membentuk aliansi untuk menavigasi dinamika kekuasaan yang berubah-ubah terkhusus di Kota Palangka Raya. Selain itu, masyarakat secara keseluruhan dapat memobilisasi dan mengadvokasi perubahan sebagai respons terhadap kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar. Mereka dapat bersatu untuk mengatasi permasalahan seperti perubahan iklim, kesenjangan, atau ketidakstabilan politik, memperjuangkan tindakan kolektif dan reformasi kebijakan. Meskipun kekuatan dari luar bisa sangat kuat dan berpengaruh, individu dan organisasi tidak boleh meremehkan hak pilihan dan kemampuan mereka sendiri untuk membentuk respons mereka. Dengan bersikap proaktif, mudah beradaptasi, dan berpikiran maju, mereka dapat memitigasi

risiko, memanfaatkan peluang, dan menavigasi lanskap kompleks dari kekuatan-kekuatan eksogen (Buckley, 2021).

Analisis Tantangan Lingkungan di Kota Palangka Raya memberikan dampak perubahan iklim yang spesifik untuk Kota Palangka Raya, seperti kenaikan suhu, pola hujan yang berubah, dan potensi risiko bencana alam terkait. Keanekaragaman ekosistem di sekitar kota, termasuk hutan dan sungai, serta potensi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem tersebut. Dari Identifikasi kebijakan yang ada ternyata kebijakan perubahan iklim yang sudah ada di tingkat lokal dan nasional yang berdampak pada Kota Palangka Raya. Hal itu menyebabkan kebijakan yang ada mencerminkan prinsip-prinsip *Exogenous Force Theory* dan Teori Negara Otonom, serta sejauh mana keberlanjutan kebijakan tersebut diimplementasikan. Dinamika politik di tingkat lokal yang dapat memengaruhi formulasi kebijakan perubahan iklim, termasuk hubungan antara pemerintah daerah dan aktor-aktor lainnya. Pengaruh Keputusan Politik Terhadap Kebijakan: Menilai bagaimana keputusan politik dapat memengaruhi pengembangan dan implementasi kebijakan perubahan iklim.

Rekomendasi berdasarkan temuan merekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Serta mendorong peran aktor-aktor kunci dalam mendorong atau menghambat implementasi rekomendasi kebijakan. Teori formulasi kebijakan, *Exogenous Force Theory*, dan Teori Negara Otonom dapat diaplikasikan secara khusus dalam konteks Kota Palangka Raya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim di kota tersebut.

Penting untuk menyadari bahwa tidak semua kekuatan eksogen bersifat negatif. Faktanya, beberapa faktor eksternal tersebut dapat membawa perubahan dan peluang positif. Misalnya, kemajuan teknologi dan globalisasi telah membuka pasar baru dan menciptakan peluang bagi dunia usaha untuk berekspansi secara internasional. Internet telah memudahkan individu untuk mengakses informasi, terhubung dengan orang lain, dan terlibat dalam kewirausahaan (Wallace et al., 2020). Demikian pula, pergeseran geopolitik dapat menciptakan aliansi dan kolaborasi baru yang mendorong perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Organisasi dan perjanjian internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, menyediakan platform bagi negara-negara untuk mengatasi tantangan bersama dan berupaya mencapai tujuan bersama. Selain itu, faktor eksogen seperti bencana alam atau krisis kesehatan dapat memacu inovasi dan ketahanan (Reinalda & Verbeek, 2023). Misalnya, sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, banyak bisnis dan industri dengan cepat beralih ke pekerjaan jarak jauh dan solusi virtual, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi dan fleksibilitas khususnya di Kota Palangka Raya. Pemerintah Kota Palangka Raya dan organisasi internasional seperti Green Growth Global Indonesia (GGGI) di Kalimantan Tengah juga meningkatkan investasi mereka dalam bantuan penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan eksogen dapat menimbulkan tantangan, kekuatan tersebut juga dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan, inovasi, dan perubahan positif. Penting bagi individu dan organisasi untuk tetap mampu beradaptasi, berpikiran terbuka, dan proaktif untuk memanfaatkan peluang ini dan menavigasi lanskap kekuatan eksogen yang selalu berubah (Spaargaren, 2020).

E. KESIMPULAN

Teori Negara Otonom dalam formulasi kebijakan publik perubahan iklim di Kota Palangka Raya mengusulkan bahwa negara harus memiliki otoritas yang kuat dalam mengelola isu perubahan iklim. Negara harus memiliki kekuasaan penuh untuk membuat kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Namun, *Exogeneous Force Theory* menawarkan pandangan yang berbeda. Menurut teori ini, perubahan

iklim bukanlah masalah yang bisa diatasi secara langsung oleh negara. Perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh negara secara langsung. Teori ini berpendapat bahwa perubahan iklim dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti perubahan suhu atmosfer, aktivitas vulkanik, dan variasi dalam orbit bumi. Faktor-faktor ini tidak bisa dikendalikan oleh negara secara langsung, sehingga upaya negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim terbatas. *Exogeneous Force Theory* juga berpendapat bahwa upaya negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mengurangi emisi gas rumah kaca, misalnya, dapat mempengaruhi sektor industri dan mengurangi produksi dan lapangan kerja. Namun, itu bukan berarti bahwa *Exogeneous Force Theory* menolak pentingnya melindungi lingkungan. Teori ini hanya berpendapat bahwa negara tidak bisa menjadi satu-satunya aktor dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Teori ini memperkenalkan konsep kekuatan eksogen sebagai aktor lain yang mempengaruhi perubahan iklim, seperti perusahaan swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Dalam konteks Kota Palangka Raya, *Exogeneous Force Theory* dapat diterapkan dengan melihat interaksi antara negara dan aktor-aktor lain dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Negara harus bekerja sama dengan perusahaan swasta dan organisasi internasional dalam mengembangkan solusi yang efektif. Masyarakat sipil juga harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam kesimpulan, *Exogeneous Force Theory* adalah antitesis dari Teori Negara Otonom dalam formulasi kebijakan publik perubahan iklim di Kota Palangka Raya. Teori ini menekankan pentingnya melibatkan aktor-aktor lain selain negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Negara harus bekerja sama dengan perusahaan swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan solusi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Baumgartner, F., & BD Jones. (2009). *Agendas and instability in American politics*. 2nd edn. The University of Chicago Press.
- Béland, D., Howlett, M., & I Mukherjee. (2018). Instrument constituencies and public policy-making: An introduction. *Policy and Society*, 37(1), 1–13.
- Bhandary, R. R., Gallagher, K. S., & Zhang, F. (2021). Climate finance policy in practice: A review of the evidence. *Climate Policy*, 21(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1871313>
- Buckley, P. J. (2021). Exogenous and endogenous change in global value chains. *Journal of International Business Policy*, 4, 221–227.
- Capano, G., & Howlett, M. (2020). The knowns and unknowns of policy instrument analysis: Policy tools and the current research agenda on policy mixe. *Sage Open*, 10(1), 2158244019900568. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2158244019900568>
- De La Cruz, P., Acosta, L. E., Mendoza, D., Baltazar, E. B., Ibarra, A. M. A., & Lugo, E. I. E. (2020). Indicators of well-being among indigenous peoples of the Colombian Amazon: Tensions between participation in public policy making and autonomy. *Environmental and Sustainability Indicators*, 7(100044).
- Dupuis J, & Biesbroek GR. (2013). Comparing apples and oranges? The dependent variable problem in comparing and evaluating adaptation policies. *Glob Environ Change*, 13(6), 1476–1487.
- Guild, J. (2020). The political and institutional constraints on green finance in Indonesia. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 10(2), 157–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1706312>
- Kabat, P., Vierssen, V., W Veraart, J., Vellinga, P., & Aerts, J. (2003). Climate proofing the Netherlands. *Nature*, 438, 283–284.

- Massey, E., Biesbroek, G., Huitema, D., & Jordan, A. (2014). Climate policy innovation: the adoption and diffusion of adaptation policies across Europe. *Glob Environ Change*, 13(2), 341–352. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.09.002>
- Novalia, W., & Malekpour, S. (2020). Theorising the role of crisis for transformative adaptation. *Environmental Science & Policy*, 112, 361–370.
- Real-Dato J. (2009). Mechanisms of policy change: a proposal for a synthetic explanatory framework. *J Comp Policy Anal Res Pract*, 11(1), 117–143. <https://doi.org/doi:10.1007/s11558-011-9130-9>
- Reinalda, B., & Verbeek, B. (2023). Autonomous policy making by international organisations. *Routledge*, 5.
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2022). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN THE TOURISM INDUSTRY (CASE STUDY OF THE HOSPITALITY INDUSTRY IN CENTRAL KALIMANTAN, INDONESIA). *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 5(1), 165–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jessd.v5i1.1148>
- Schimmelfennig, F. (2020). Politicisation management in the European Union. *Journal of European Public Policy*, 27(3), 342–361.
- Spaargaren, G. (2020). Sustainable consumption: a theoretical and environmental policy perspective. *The Ecological Modernisation Reader*.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Susanti, T., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rpjmd Periode 2021-2026 Sebagai Upaya Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Tuban. *Publika*, 231–244. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p231-244>
- Wallace, H., Pollack, M. A., Roederer-Rynning, C., & Young, A. R. (2020). *Policy-making in the European Union*. Oxford University Press.
- Xie, Z., Zhang, F., Lun, F., Gao, Y., Ao, J., & Zhou, J. (2020). Research on a diagnostic system of rural vitalization based on development elements in China. *Land Use Policy*, 92(104421).